

Pa-banjarnegara

NHK 216582



2016

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

A

Tambahan Berita Negara RI Tanggal 26 Agustus 2016 No 68

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

I. DATA PRIBADI

- 1. Nama : ADI PERMONO, S.H.
- 2. Jabatan : SEKRETARIS - PENGADILAN AGAMA
BANJARNEGARA
- 3. Tempat & Tanggal Lahir : WONOBOSO, 3 Januari 1962
- 4. Nama Kantor : J. LETJEN SUPRAPTO, BANJARNEGARA
- 5. Tanggal Pelantikan : 18 Januari 2016

II. DATA HARTA

A. HARTA TIDAK BERGERAK Rp. 250.000.000

(TANAH DAN BANGUNAN)

- 1. Tanah & Bangunan seluas 300 m2 & 126 m2, di Kabupaten WONOSOBO, yang berasal dari HASIL SENDIRI DAN WARISAN, perolehan tahun ---
KUP Rp. 250.000.000

B. HARTA BERGERAK

a. ALAT TRANSPORTASI DAN Rp. 250.000.000

WESN LAINNYA

- 1. Mobil merk TOYOTA KIJANG INNOVA, tahun pembuatan 2011, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2014 nilai jual Rp. 175.000.000
- 2. Mobil merk DAHATSU TAFT, tahun pembuatan 1993, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2015 nilai jual Rp. 75.000.000

216582

b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA Rp.	0
c. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.	0
C. SURAT BERTAGIH Rp.	0
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA Rp.	0
E. PIUTANG Rp.	0
TOTAL HARTA (II) Rp.	500.000.000
III. HUTANG Rp.	0
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III) Rp.	500.000.000

5
Berita Negara Republik Indonesia
Tanggal 26 Agustus 2010 No. 65



Calatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis